**Indonesia dan PBB Menyepakati Komitmen Bersama Program Perlindungan Sosial Berbasis Dana Desa yang Ramah Anak dan Responsif Gender**

***Kemitraan Kementerian Desa dan PBB di Indonesia***

**Jakarta, 22 April 2021** – Pada tahun 2020, Dana Desa (DD) digunakan untuk program perlindungan sosial berbasis dana desa yang ramah anak dan responsif gender. Efektivitas program ini dibahas bersama dengan mitra program dalam webinar “Program Perlindungan Sosial Inklusif: Menuju Program Perlindungan Sosial Berbasis Dana Desa yang Ramah Anak dan Responsif Gender”. Inisiatif ini didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia lewat program COVID-19 Multi-Partner Trust Fund (MPTF). Program ini mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kebijakan dan kapasitas dalam memperluas cakupan perlindungan sosial dan dana sehingga menjangkau masyarakat yang terkena dampak dan terpinggirkan, terutama perempuan dan anak-anak.

Kementerian Desa telah memperluas program dan cakupan perlindungan sosial melalui dua program, yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan Padat Karya Tunai Dana (PKTDD). Tujuan dari program BLT DD adalah memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin atau kurang mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi yang merugikan akibat pandemi COVID-19. Sedangkan program PKTDD bertujuan untuk memberdayakan masyarakat marjinal dan miskin dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, mengurangi *stunting,* dan mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 di pedesaan. Pada tahun 2020, Kementerian Desa mengalokasikan anggaran dana desa yang cukup besar dan menyalurkannya ke desa-desa di seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp 10,54 triliun untuk PKTDD, dan Rp 18,49 triliun untuk BLT DD.

Mempertimbangkan peran penting program perlindungan sosial berbasis dana desa dalam satu tahun terakhir, melalui program ini UNICEF, UNDP, WFP dan UN Women bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk melakukan tiga kegiatan berbeda, yaitu Pembentukan Sistem Pemantauan dan Evaluasi Proses Penyaluran Dana Desa berdasarkan Program Perlindungan Sosial oleh UNICEF dan CEDS Universitas Padjadjaran; studi tentang “Penilaian Efektivitas Mekanisme Penargetan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa” oleh UNDP; dan rancangan rantai nilai responsif gender dan program pengembangan kewirausahaan dengan meluncurkan program percontohan tentang padat karya tunai berkelanjutan di Jawa Barat oleh UN Women.

uji coba program PKTDD yang responsif gender di Jawa Barat (oleh UN Women).

* “Merupakan komitmen kami untuk memastikan program perlindungan sosial lebih efektif untuk menjangkau kelompok rentan, dengan kesalahan inklusivitas dan pengecualian yang seminim mungkin, sehingga program benar-benar inklusif, responsif dan adaptif, serta berkontribusi pada pemulihan jangka panjang dan ketahanan iklim, serta responsif gender,” jelas **Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd**., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
* “Kami menghargai komitmen dan peran penting Kementerian Desa yang dengan segera menggunakan dana desa untuk program bantuan langsung tunai dan padat karya tunai dalam merespon dampak COVID-19. Kami yakin upaya bersama kami dalam memperkuat program perlindungan sosial berbasis dana desa merupakan langkah penting untuk mendukung pemerintah membangun perlindungan sosial yang adaptif,” kata **Valerie Julliand**, United Nations Resident Coordinator untuk Indonesia.

Beberapa tantangan dalam program perlindungan sosial adalah kriteria kelayakan dan pertimbangan proses pemilihan, serta penentuan sasaran dan jenis kerentanan lain dalam desain dan implementasi respon perlindungan sosial, seperti kesenjangan dalam inklusi dan kesalahan eksklusi. UNICEF bermitra dengan CEDS Universitas Padjadjaran dalam membangun sistem pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan hal ini, serta memastikan bahwa perlindungan sosial dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan anak-anak dan anggota keluarga yang rentan lainnya.

* “Program ini bertujuan untuk mendukung Kementerian Desa dalam merancang sistem pemantauan dan evaluasi program perlindungan sosial dengan skema dana desa pada saat pandemi COVID-19. Secara umum penggunaan utama BLT DD adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan anak (gizi dan kebutuhan sekolah). Agar perlindungan sosial lebih responsive gender, kami merekomendasikan beberapa hal antara lain penguatan pedoman umum, perbaikan sistem dan mekanisme pendaftaran, koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait, dan sinergi BLT DD dengan program perlindungan sosial lainnya untuk DTKS yang lebih mutakhir dan terintegrasi,” jelas **Dr. Martin Siyaranamual**, peneliti CEDS Universitas Padjadjaran.

“Studi ini menemukan bahwa mekanisme penargetan komunitas memungkinkan terjadinya akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar, dan berpotensi menyebabkan tingkat kepuasan warga yang lebih tinggi. Walaupun perempuan serta kelompok rentan telah diprioritaskan sebagai penerima BLT DD, namun penerapan bantuan sosial yang responsif gender masih menjadi tantangan,” ujar **Dr. Rumayya Batubara**, Dosen Universitas Airlangga.

Aspek penting lain dari perlindungan sosial adalah memastikan agar program tersebut responsif gender. Dalam merespon COVID-19, UN Women menyoroti kebutuhan akan hal ini dan berupaya agar program perlindungan sosial mempertimbangkan aspek kerja pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak berbayar, mengingat dampak pandemi yang tidak proporsional terhadap perempuan dan laki-laki. UN Women dan Yayasan Care Peduli telah merintis intervensi berbasis uang tunai untuk mendukung perempuan yang kehilangan pekerjaan melalui program pengembangan kewirausahaan yang dikombinasikan dengan intervensi berbasis masyarakat untuk mendorong pembagian pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan yang adil.

* “Program ini memberikan pembelajaran tentang penyusunan dan pelaksanaan skema padat karya tunai (*cash-for-work*) berkelanjutan yang dapat berfokus pada peningkatan pendapatan serta pemberdayaan perempuan. Keduanya bisa menjadi tujuan utama dalam respon perlindungan sosial terhadap COVID-19,” kata **Dwi Yuliawati Faiz**, Kepala Program UN Women Indonesia.

Catatan untuk editor:

1. [Buku\_Saku\_Pendataan\_BLT-Dana\_Desa\_FINAL.pdf (bappenas.go.id)](https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf) – Bappenas, KOMPAK, Juni 2020
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 - www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3650/ini-prioritas-penggunaan-dana-desa-2021

\*\*\*

**Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kontak

[humas@kemendesa.go.id](mailto:humas@kemendesa.go.id)

**Tentang United Nations COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund/COVID-19 MPTF**

COVID-19 MPTF adalah bagian dari United Nations COVID-19 Response and Recovery Fund yang merupakan mekanisme pendanaan antar badan PBB yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk membantu mendukung negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah dalam mengatasi krisis kesehatan dan krisis pembangunan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 dan mendukung mereka yang paling rentan dalam mengatasi kesulitan ekonomi dan gangguan sosial. Hal ini memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan dan menawarkan solusi inovatif yang memetakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih inklusif untuk semua orang.

**Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945. Saat ini terdiri dari 193 Negara Anggota. Misi dan pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dipandu oleh tujuan dan prinsip yang terkandung dalam Piagam pendiriannya. Di Indonesia, PBB berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada tahun 2030. *UN Country Team* dipimpin oleh Kepala Perwakilan PBB (*UN Resident Coordinator/ RC*) perwakilan tertinggi PBB sistem pembangunan di tingkat negara. *RC* memimpin *UN Country Team* dalam konsultasi dengan Pemerintah untuk menentukan dan menyetujui tanggap strategis PBB terhadap prioritas pembangunan Pemerintah dalam melaksanakan Agenda 2030. *RC* / Kepala Perwakilan PBB adalah perwakilan yang ditunjuk dari – dan melapor kepada – Sekretaris Jenderal PBB.

Kontak Media

UN Information Centres Andri Suryo, National Information Officer ([andri.suryo@un.org](mailto:andri.suryo@un.org))

**Tentang Badan PBB**

**Tentang UNICEF**

UNICEF mendukung hak dan kesejahteraan setiap anak melalui seluruh progam yang dilakukan. Bersama dengan para donatur, kami beroperasi di lebih dari 190 negara dan wilayah untuk mewujudkan komitmen kami dalam bentuk tindakan nyata. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu anak-anak di wilayah yang paling sulit terjangkau, memberikan yang terbaik untuk seluruh anak, di seluruh dunia.

Kontak Media

UNICEF Indonesia Communications Specialist, Kinanti Pinta Karana, [kpkarana@unicef.org](mailto:kpkarana@unicef.org), +62 8158805842

**Tentang UNDP Indonesia**

UNDP adalah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkemuka yang berjuang untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan perubahan iklim. Bekerja dengan jaringan ahli dan mitra kami di 170 negara, kami membantu negara-negara untuk membangun solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan bagi manusia dan planet ini.

Pelajari lebih lanjut di undp.org atau ikuti di @UNDP

Kontak Media

UNDP Indonesia Communication Specialist, Tomi Soetjipto, [suryo.tomi@undp.org](mailto:suryo.tomi@undp.org)

**Tentang UN Women**

UN Women merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdedikasi untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Upaya UN Women didasarkan pada keyakinan dasar bahwa setiap perempuan berhak menjalani hidup yang bebas dari kekerasan, kemiskinan, dan diskriminasi, dan bahwa kesetaraan gender merupakan prasyarat dalam tercapainya pembangunan global.

Kontak Media

Radhiska Anggiana, Advocacy and Communication Officer, [radhiska.anggiana@unwomen.org](mailto:radhiska.anggiana@unwomen.org)